

Evaluasi Pasca Diklat Tim Pendamping Keluarga dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting

(Post-Training Evaluation for Family Assistance Team to Accelerate Stunting Reduction)

Annastasia Nika Susanti¹, Anisa Kuswandari Banuwa^{2*}

Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Indonesia^{1,2}

[¹](mailto:annastasianikasusanti@gmail.com), [^{2*}](mailto:anisa.kuswandari@gmail.com)



Riwayat Artikel:

Diterima pada 1 Maret 2025
Revisi 1 pada 10 Maret 2025
Revisi 2 pada 1 April 2025
Revisi 3 pada 10 April 2025
Disetujui pada 15 April 2025

Abstract

Purpose: This study aims to determine the results of the post-training evaluation (TPK orientation).

Research methodology: The research method used in this study is a quantitative method. The data used are primary data obtained from the results of questionnaires distributed to 152 respondents from 7 districts/cities in Lampung Province.

Results: Data analysis was carried out descriptively using visualization in the form of diagrams and tables. From the results of the analysis, it is known that the knowledge of the respondents is quite good but still needs further exploration, especially on the material for using the Elsimil application. In addition, the implementation of the TPK orientation activities was in accordance with the planned TOR (Term of Reference). Meanwhile, from the follow-up aspect, the involvement of districts/cities in providing guidance to TPK is still not evenly distributed because several districts/cities have not carried out further guidance for TPK.

Conclusion: Based on the descriptive analysis, respondents' knowledge is generally good but still requires further improvement, particularly in the use of the Elsimil application. The implementation of the 2021 TPK Orientation aligns with the TOR provided by BKKBN Lampung Province, although follow-up guidance by districts remains uneven.

Limitations: For further research, it is hoped that researchers can take a larger number of samples from 15 districts/ cities that the evaluation results will be more representative for future improvements.

Contribution: The results of this study can be a reference for BKKBN Lampung Province in conducting appropriate training especially in accelerating stunting reduction through TPK orientation.

Keywords: *Family Assistance Team, Post-Training Evaluation, Stunting.*

How to Cite: Susanti, A. N., Banuwa, A. K. (2025). Evaluasi Pasca Diklat Tim Pendamping Keluarga dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting. *Jurnal Abdimas Multidisiplin*, 3(2), 93-102.

1. Pendahuluan

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah program yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman karyawan tentang lingkungan kerja secara keseluruhan. Pendidikan dan pelatihan masing-masing memiliki arti yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya selama pendidikan merupakan bagian dari pendidikan (Yusuf & Arif, 2015). Sementara itu, pelatihan adalah pendekatan

sistematis untuk menambah keterampilan dan meningkatkan pengetahuan secara efektif dalam waktu singkat. Pelatihan merupakan suatu desain yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk tugas pekerjaan tertentu (Prasetyo, Aeny, & Amelia, 2022). Hal ini membantu untuk memajukan kinerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitas, dan mengembangkan kemampuan untuk belajar peserta (Govil & Usha, 2014).

Pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai sarana pemberdayaan pegawai harus dikelola secara profesional, dengan memperhatikan seluruh siklus manajemen pelatihan, yang dimulai dengan analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pengelolaan, diharapkan efektivitas program pelatihan akan meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu langkah terpenting dalam mencoba menilai efektivitas program diklat adalah evaluasi diklat (Anthony, Kacmar, & Perrew, 2002). Penilaian diklat meliputi penilaian pra pelatihan, dalam pelatihan, dan pasca pelatihan. Penilaian pra pelatihan meliputi penilaian selama periode persiapan pelatihan, tahap perencanaan dan persiapan. Penilaian dalam pelatihan dilakukan baik di bidang akademik maupun nonakademik, teknis, dan administrasi selama proses pelatihan. Sementara itu, penilaian lanjutan terhadap pelatihan dilakukan setelah alumni diklat kembali ke satuan unit kerja. Penilaian pasca pelatihan ditujukan untuk mengetahui keberhasilan program diklat, khususnya bagaimana alumni diklat mempraktikkan hasil diklat di dunia kerja (Amilahaq, Kusumawati, & Pasha Irawan, 2022; Faeni, Faeni, Oktaviani, & Hidayat, 2021).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN menyelenggarakan fungsi salah satunya penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Lebih lanjut, BKKBN melalui deputi bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan (lalitbang) serta melalui bidang pelatihan dan pengembangan (latbang) yang ada di setiap kantor perwakilan BKKBN provinsi, selalu berupaya meningkatkan kompetensi pegawai BKKBN melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Diklat yang diberikan tidak terbatas pada pegawai yang ada di kantor tetapi juga untuk seluruh pegawai BKKBN yang ada di lapangan, yakni Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Dengan demikian seluruh insan BKKBN diharapkan memiliki kompetensi, pemahaman, dan pengetahuan yang merata demi kesuksesan Program Bangga Kencana di Indonesia (Nugroho, Liyana, Muamarah, & Wijaya, 2022; Sinaga, Akadiati, & Purwanti, 2022).

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan amanat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yakni BKKBN ditugaskan sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dengan target 14% pada tahun 2024. Oleh karena itu, BKKBN menyusun berbagai rencana strategis demi terwujudnya target tersebut pada tahun 2024. Salah satu langkahnya adalah dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari unsur Bidan, PKK, dan kader KB. Tugas dari TPK adalah melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga. Kegiatan pendampingan tersebut meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans/ pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor risiko *stunting* (Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2021 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Dalam rangka mendukung kinerja TPK di lapangan, seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung melakukan kegiatan orientasi TPK agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal di lapangan (Hawa, Setyorini, & Nabyla, 2023; Mashur, Yakubi, & Riswandi, 2024). Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan melakukan *Training of Facilitator* (ToF) yang diperuntukan bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di 228 kecamatan dari 15 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya untuk kegiatan orientasi di tingkat kecamatan dilakukan oleh PKB yang telah mengikuti *Training of Facilitator* (ToF). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan orientasi TPK di tingkat kecamatan, maka dilakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pasca pelatihan. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi pasca pelatihan ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait pelaksanaan kegiatan orientasi TPK di

tingkat kecamatan. Selain itu, juga dapat menjadi masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan orientasi TPK selanjutnya (Sutrisno et al., 2023).

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Evaluasi Diklat

Pelatihan adalah aspek penting dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian (ES, 2015). Lebih lanjut, menurut Wljonarko (2021), keberhasilan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui diklat yang dilakukan dapat dinilai dari evaluasi diklat. Evaluasi diklat dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi bagi pengambil keputusan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, meningkatkan, atau mengakhiri program, serta rekomendasi. Selain itu, penilaian akan mengukur efektivitas keberhasilan pelaksanaan pelatihan (ES, 2015).

Ada dua jenis evaluasi diklat itu sendiri. Yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan atau penyelenggaraan yang biasanya dilakukan pada akhir periode pelatihan. Evaluasi ini menilai program diklat, sarana dan prasarana, peserta, penyelenggara, dan widyaiswara. Evaluasi kedua yaitu, penilaian pasca diklat yang dilakukan sesaat setelah diklat berakhir, dan peserta kembali ke unit kerjanya (Rusmulyani, 2020). Hasil evaluasi pasca diklat akan digunakan sebagai umpan balik untuk merencanakan kembali pelaksanaan diklat di masa depan dan akan berkontribusi secara aktif untuk meningkatkan kinerja alumni diklat (Kristiyana, Siswanto, & Pambudi, 2022; Yunus, 2019).

2.2 Stunting dan Tim Pendamping Keluarga (TPK)

Menurut Pem (2015), *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan anak terlalu pendek untuk usianya. *Stunting* dapat menyebabkan perkembangan kognitif atau kecerdasan, motorik, dan verbal berkembang secara tidak optimal, peningkatan risiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, peningkatan biaya kesehatan, serta peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. *Stunting* sebagai salah satu bentuk manifestasi dari malnutrisi berkaitan dengan berbagai faktor yang kompleks sebagai penyebabnya (Widanti, 2016). Bloem et al. (2013) memaparkan bahwa penyebab terjadinya malnutrisi menyangkut berbagai aspek, yaitu asupan gizi yang tidak adekuat, kesulitan akses terhadap pangan yang sehat, kurangnya perhatian, dan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak, kurangnya pengetahuan, sampai pada aspek sosial, ekonomi, dan politik sebagai aspek-aspek mendasar.

Berdasarkan Wardita, Suprayitno, and Kurniyati (2021), kejadian *stunting* di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 pemerintah menyusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Dalam rangka mencapai target penurunan angka *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024, Presiden menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting. Selanjutnya melalui BKKBN, dibentuklah Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai upaya pelaksanaan rencana aksi nasional. Adapun kelompok sasaran pendampingan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 adalah meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 – 59 bulan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK) baik dari unsur Bidan, PKK, maupun Kader KB yang telah mengikuti kegiatan Orientasi TPK tingkat kecamatan pada tahun 2021. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*, yakni dengan metode *accidental sampling* atau pengambilan sampel dilakukan secara nonrandom dimana anggota populasi target yang memenuhi kriteria praktis tertentu, seperti aksesibilitas yang mudah, kedekatan geografis, ketersediaan pada waktu tertentu, atau kesediaan untuk berpartisipasi dilibatkan sebagai sampel penelitian (Etikan, Musa, Alkasim, 2016). Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 152 orang anggota TPK yang berasal dari Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Pesisir Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Way Kanan,

dan Lampung Barat. Data dikumpulkan dari responden yang kebetulan ada atau tersedia di lokasi dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan dikelompokkan serta direkapitulasi berdasarkan unsur yang akan dianalisis.

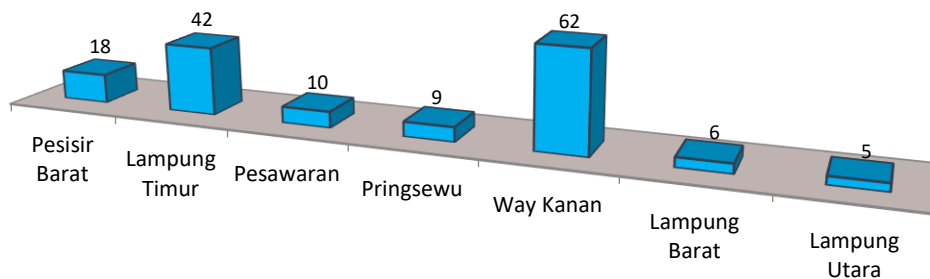
4. Hasil dan pembahasan

Bagian ini akan memberikan gambaran terkait profil responden dalam penelitian ini serta hasil analisis data secara deskriptif. Gambaran profil responden dalam penelitian ini meliputi asal kabupaten responden dan status responden dalam TPK. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang diukur meliputi aspek Pengetahuan Responden, aspek Pelaksanaan Orientasi, dan aspek Tindak Lanjut Pasca Orientasi.

4.1 Profil Responden

4.1.1 Asal Kabupaten Responden

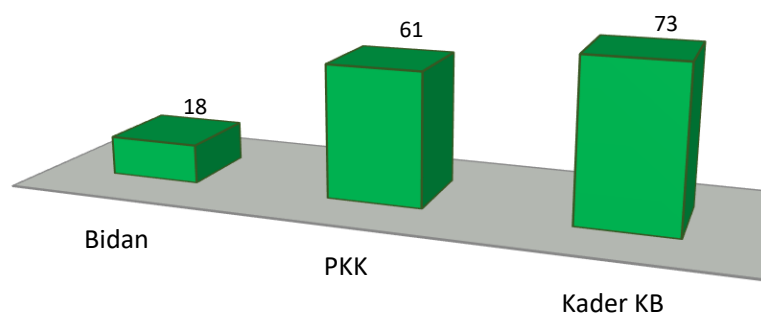
Responden dalam penelitian ini berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang menjadi sasaran evaluasi terkait dengan kegiatan Orientasi TPK Tahun 2021. Jumlah responden pada setiap kabupaten berbeda-beda sesuai dengan jumlah responden yang tersedia di lokasi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, responden dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Way Kanan (62 orang) dan Kabupaten Lampung Timur (42). Adapun sebaran jumlah responden setiap Kabupaten sasaran tergambar dalam diagram berikut ini.



Gambar 1. Diagram sebaran jumlah responden berdasarkan Kabupaten

4.1.2 Status Responden dalam TPK

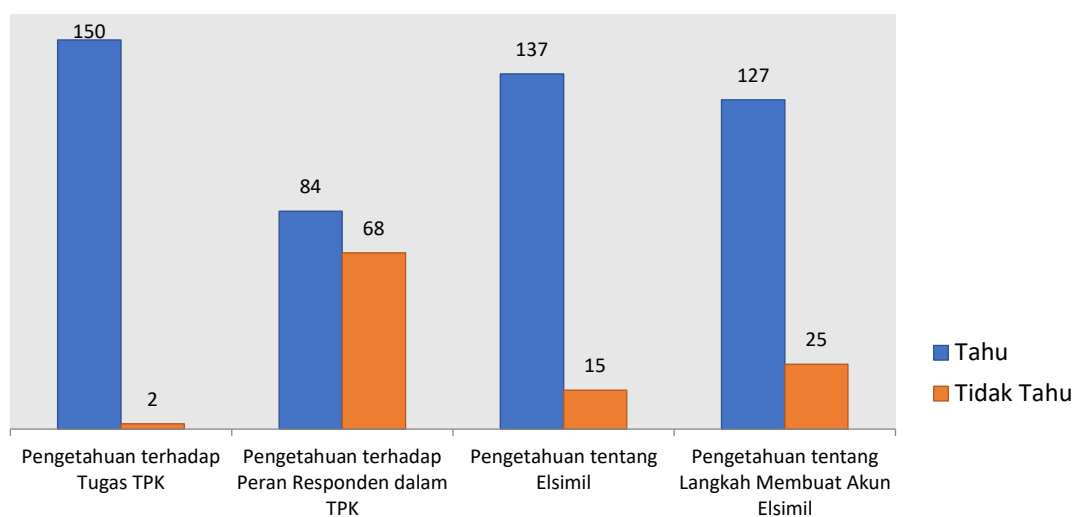
Responden dalam penelitian ini merupakan anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari unsur Bidan, PKK, dan Kader KB. Adapun anggota TPK yang menjadi responden adalah mereka yang sudah mengikuti kegiatan Orientasi TPK yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 di tingkat kecamatan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas berasal dari unsur Kader KB, yakni sebanyak 73 orang. Berikut ini adalah gambaran sebaran status responden dalam TPK.



Gambar 2. Diagram sebaran status responden dalam TPK

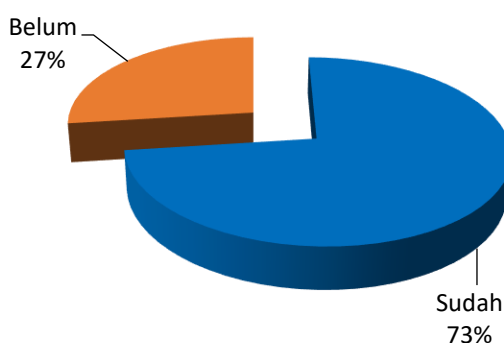
4.2 Aspek Pengetahuan Responden

Bagian ini akan memberikan gambaran terkait pengetahuan responden sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) setelah mengikuti kegiatan Orientasi TPK pada tahun 2021. Pengetahuan responden yang diukur dalam hal ini meliputi tugas TPK, peran responden dalam TPK, pengetahuan responden tentang aplikasi elsimil, pengetahuan responden tentang langkah membuat akun elsimil dan status pembuatan akun elsimil bagi pendamping. Berikut ini adalah gambaran pengetahuan responden terkait dengan tugas TPK, peran responden dalam TPK, aplikasi Elsimil, dan langkah membuat akun elsimil.



Gambar 3. Diagram Gambaran Pengetahuan Responden

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap pengetahuan responden setelah mengikuti kegiatan Orientasi TPK tahun 2021, tampak bahwa mayoritas responden telah memiliki pengetahuan terkait dengan tugas TPK (150 orang), pengetahuan terhadap peran dalam TPK (84 orang), pengetahuan tentang aplikasi Elsimil (137 orang), dan pengetahuan tentang langkah membuat akun Elsimil (127 orang). Hal tersebut secara umum menunjukkan bahwa pengetahuan responden setelah mengikuti kegiatan orientasi di tingkat kecamatan sudah cukup baik. Selain itu, pada aspek pengetahuan responden ini juga diukur apakah responden sudah membuat akun Elsimil atau belum, mengingat aplikasi Elsimil adalah *tools* yang akan digunakan TPK untuk melakukan pendampingan kepada kelompok sasaran. Berdasarkan analisis deskriptif, diketahui bahwa sebanyak 73% responden sudah berhasil membuat akun Elsimil bagi TPK sedangkan sisanya (27%) belum membuat akun Elsimil bagi TPK seperti yang tergambar pada diagram berikut ini.



Gambar 4. Diagram Status Pembuatan Akun Elsimil bagi TPK

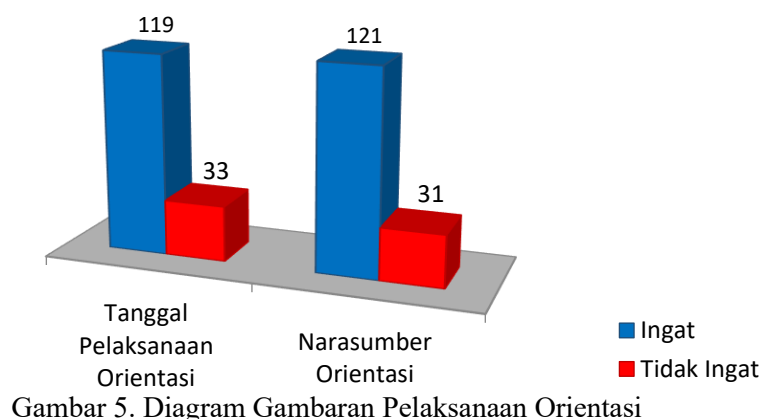
Dari diagram tersebut diketahui bahwa sebanyak 27% responden belum melakukan pendaftaran akun Elsimil bagi TPK. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor teknis maupun non-teknis. Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap pertanyaan terbuka dari kuesioner, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan responden belum membuat akun Elsimil.

Tabel 1 Faktor Penyebab Belum Membuat Akun Elsimil

No	Faktor Penyebab
1	Akses sinyal yang sulit
2	Kurang fasih dalam penggunaan teknologi
3	Belum paham langkah membuat akun Elsimil
4	Aplikasi sering mengalami gangguan (<i>error</i>)
5	Tidak memiliki alamat email
6	Belum ada sasaran pendampingan

4.3 Aspek Pelaksanaan Orientasi TPK

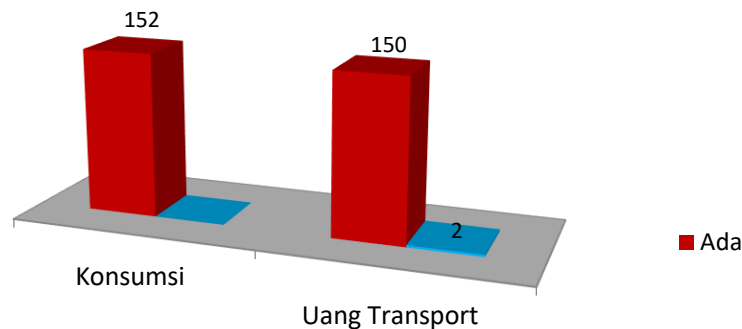
Bagian ini akan memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan Orientasi TPK Tahun 2021 di tingkat kecamatan apakah sudah sesuai dengan *Term of Reference* (TOR) yang ditentukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung ataukah belum. Adapun hal-hal yang diukur adalah terkait dengan tanggal pelaksanaan orientasi, narasumber orientasi, durasi pelaksanaan orientasi, serta akomodasi orientasi. Berikut ini adalah gambaran pelaksanaan Orientasi TPK terkait dengan tanggal pelaksanaan dan narasumber orientasi.



Gambar 5. Diagram Gambaran Pelaksanaan Orientasi

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap pelaksanaan orientasi TPK di tingkat kecamatan dari sisi tanggal pelaksanaan dan narasumber orientasi, menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih mengingat tanggal pelaksanaan orientasi (119 orang) dan narasumber orientasi (121 orang). Pelaksanaan kegiatan orientasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada rentang tanggal 15 – 26 November 2021. Adapun narasumber yang mengisi materi dalam kegiatan orientasi adalah peserta kegiatan *Training of Facilitator* (ToF) di tingkat Provinsi. Data terkait tanggal pelaksanaan orientasi dan narasumber orientasi selanjutnya divalidasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh penanggungjawab kecamatan masing-masing. Berdasarkan hasil validasi data, diketahui bahwa tanggal pelaksanaan orientasi dan narasumber orientasi dari penelitian ini telah sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

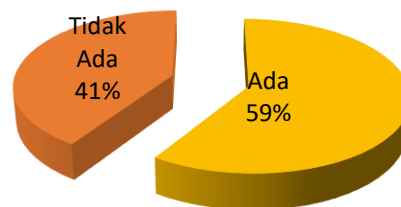
Selain itu, pada aspek pelaksanaan orientasi TPK juga mengukur dari sisi akomodasi orientasi. Berdasarkan *Term of Reference* (TOR) yang diberikan oleh BKKBN Provinsi, pelaksanaan kegiatan orientasi TPK di tingkat kecamatan harus menyediakan akomodasi bagi peserta orientasi (TPK) berupa konsumsi dan uang *transport*. Akomodasi tersebut sudah ditentukan nominalnya oleh BKKBN Provinsi sehingga setiap kecamatan dapat menyesuaikan untuk kapasitas konsumsinya sesuai dengan wilayah masing-masing. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, seluruh responden menjawab telah menerima konsumsi selama kegiatan orientasi TPK berlangsung. Di lain sisi terdapat 2 responden yang menjawab tidak menerima uang *transport* setelah mengikuti kegiatan orientasi TPK seperti pada Gambar 7.



Gambar 7. Diagram Akomodasi Orientasi

4.4 Aspek Tindak Lanjut Pasca Orientasi

Pada bagian ini, tampak gambaran terkait dengan tindak lanjut pasca Orientasi TPK Tahun 2021 di tingkat kecamatan. Tindak lanjut tersebut meliputi ada tidaknya pembinaan dari kabupaten terkait TPK dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh TPK pasca pelaksanaan orientasi TPK. Berikut ini adalah gambaran terkait status pembinaan lanjutan di tingkat kabupaten.



Gambar 8. Diagram status pembinaan dari Kabupaten

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebanyak 59% responden menjawab ada pembinaan lanjutan dari kabupaten pasca kegiatan Orientasi TPK sedangkan sisanya (41%) menjawab tidak menerima pembinaan lanjutan dari kabupaten. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan kabupaten dalam mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* masih belum maksimal. Adapun dari hasil rekapitulasi terkait pihak kabupaten yang melakukan pembinaan lanjutan adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Pembina Lanjutan Tingkat Kabupaten

No	Kabupaten	Faktor Penyebab
1	Pesisir Barat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinas P3AKB)
	Pringsewu	
2	Lampung Timur	PKK Kabupaten

Pada aspek tindak lanjut pasca orientasi TPK, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TPK setelah mengikuti kegiatan orientasi. Namun demikian, dalam melaksanakan peran sebagai TPK terdapat beberapa kendala yang dialami oleh TPK. Kendala tersebut meliputi kendala teknis dan non teknis. Tabel berikut ini menunjukkan daftar kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TPK dan juga daftar kendala yang dialami oleh TPK.

Tabel 3 Daftar Kegiatan TPK dan Kendala TPK

No	Daftar Kegiatan TPK	Daftar Kendala TPK
1	Mengumpulkan data sasaran	Akses sinyal dan jalan
2	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada catin	Calon pengantin sulit untuk ditemui dan diberikan pendampingan
3	Melakukan pendampingan bagi baduta dan balita	Catin tidak mau mengunduh aplikasi Elsimil dan mengisi kuesioner
4	Mendorong catin agar memeriksakan diri ke faskes	Catin tidak memiliki HP android
5	Melakukan pendampingan bagi ibu hamil	Kurang komunikasi dengan aparat setempat perihal pendampingan catin
6	Melakukan koordinasi dengan tokoh formal	Masyarakat (sasaran) kurang kooperatif
7	Memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan	Belum memahami penggunaan aplikasi Elsimil dan peran TPK
8	Melakukan sosialisasi di posyandu tentang <i>stunting</i>	Sering terjadi kesalahpahaman dengan orang tua anak yang mengalami <i>stunting</i>

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis secara deskriptif terhadap data yang diperoleh dari responden, dapat disimpulkan bahwa aspek pengetahuan responden sudah cukup baik namun masih perlu pendalaman lebih lanjut khususnya pada penggunaan aplikasi Elsimil. Selain itu, untuk aspek pelaksanaan kegiatan Orientasi TPK Tahun 2021 juga dapat dikatakan sudah cukup sesuai dengan *Term of Reference* (TOR) yang diberikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Dalam hal tindak lanjut pasca orientasi, keterlibatan pihak kabupaten dalam melakukan pembinaan terhadap TPK masih belum dilaksanakan secara merata yang dilihat dari adanya beberapa kabupaten yang belum sama sekali melakukan pembinaan lanjutan bagi TPK. Sementara itu, secara umum kendala yang dihadapi TPK dalam melaksanakan tugasnya adalah terkait dengan kendala non teknis seperti masalah terkait komunikasi, sosialisasi, dan advokasi.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan pendekatan ilmiah, namun masih memiliki kekurangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan peneliti untuk mengambil sampel di 15 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung agar evaluasi dapat lebih menyeluruh dan semakin representatif.
2. Metode penelitian dalam evaluasi ini hanya menggunakan kuesioner sehingga jawaban yang diperoleh kurang mendalam. Untuk itu, perlu diperdalam dengan wawancara atau FGD.

Ucapan terima kasih

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Provinsi Lampung yang telah memberikan dukungan baik moril dan materiil sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

Referensi

- Amilahaq, F., Kusumawati, D. A., & Pasha Irawan, B. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Profesionalisme dengan Pelatihan Pencatatan Keuangan Syariah untuk Peternak Dombos. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(2), 85-95. doi:[10.35912/jnm.v1i2.762](https://doi.org/10.35912/jnm.v1i2.762)
- Anthony, W. P., Kacmar, K. M., & Perrew, P. L. (2002). Human resource management: A strategic approach. (No Title).
- Bloem, M. W., de Pee, S., Le Hop, T., Khan, N. C., Laillou, A., Minarto, . . . Solon, J. A. (2013). Key strategies to further reduce stunting in Southeast Asia: Lessons from the ASEAN countries workshop. *Food and nutrition bulletin*, 34(2_suppl1), S8-S16. [10.1177/15648265130342S103](https://doi.org/10.1177/15648265130342S103)
- ES, D. P. (2015). Evaluasi pelatihan (training) level II berdasarkan teori the four levels Kirkpatrick. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 3(2), 119-128. [10.21009/JPEB.003.2.1](https://doi.org/10.21009/JPEB.003.2.1)
- Faeni, D. P., Faeni, R. P., Oktaviani, R. F., & Hidayat, R. S. (2021). PkM Implementasi Tata Nilai-Nilai Integritas Akademisi berbasis Sistematisa Penyuluh Antikorupsi bersama LSP P3 Pembangunan Penyuluh Integritas Bangsa: Studi Kasus Pembentukan Zona Integritas di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(1), 21-32. doi:[10.35912/jnm.v1i1.621](https://doi.org/10.35912/jnm.v1i1.621)
- Govil, S., & Usha, K. (2014). The importance of training in an organization. *Advances in Management*, 7(1), 44.
- Hawa, S. D., Setyorini, R., & Nabya, F. (2023). Pelatihan Tata Kelola Manajemen dan Digital Marketing bagi Kelompok Pengrajin Budi Sangkar. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 2(2), 73-80. doi:[10.35912/jpe.v2i2.1568](https://doi.org/10.35912/jpe.v2i2.1568)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. .
- Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2021 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2021. Jakarta.
- Kristiyana, S., Siswanto, D., & Pambudi, P. E. (2022). Sistem Komunikasi Radio Terpadu Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api di Kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 1(1), 39-50. doi:[10.35912/jpu.v1i1.766](https://doi.org/10.35912/jpu.v1i1.766)
- Mashur, M., Yakubi, M., & Riswandi, D. (2024). Edukasi Ekonomi Syariah bagi Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 3(1), 19-27. doi:[10.35912/jpe.v3i1.3041](https://doi.org/10.35912/jpe.v3i1.3041)
- Nugroho, R., Liyana, N. F., Muamarah, H. S., & Wijaya, S. (2022). Relawan Pajak 2021: Upaya Menjaga Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pengisian SPT secara Daring. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(3), 157-165. doi:[10.35912/jnm.v1i3.763](https://doi.org/10.35912/jnm.v1i3.763)
- Pem, D. (2015). Factors affecting early childhood growth and development: Golden 1000 days. *Adv Practice Nurs*, 1(101), 2573-0347. [10.4172/2573-0347.1000101](https://doi.org/10.4172/2573-0347.1000101)
- Peraturan Presiden RI No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Jakarta.
- Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Jakarta.
- Prasetyo, T., Aeny, T. N., & Amelia, Y. (2022). Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Kelompok Masyarakat Adat Tiyuh Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1(1), 55-61. doi:[10.35912/jnm.v1i1.631](https://doi.org/10.35912/jnm.v1i1.631)
- Rusmulyani, K. (2020). Kajian evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III pada badan diklat Provinsi Bali. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 18(2), 236-262. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v18i2.215>
- Sinaga, I., Akadiati, V. A. P., & Purwanti, A. S. M. (2022). Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1), 25-33. doi:[10.35912/jpe.v1i1.1036](https://doi.org/10.35912/jpe.v1i1.1036)
- Sutrisno, P., Debora, D., Destriana, N., Putri, A. T. K. P. S., Marlinah, A., Wijaya, N., & Lekok, W. (2023). Pendampingan Pelatihan Software Akuntansi Accurate dalam Membantu Guru & Siswa-Siswi Smk untuk Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 2(1), 29-37. doi:[10.35912/jpe.v2i1.716](https://doi.org/10.35912/jpe.v2i1.716)
- Laporan Evaluasi Dampak Diklat. Jawa Timur, (2018).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 78, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wardita, Y., Suprayitno, E., & Kurniyati, E. M. (2021). Determinan Kejadian Stunting pada Balita. *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 6(1), 7-12. <https://doi.org/10.24929/jik.v6i1.1347>
- Widanti, Y. A. (2016). Prevalensi, faktor risiko, dan dampak stunting pada anak usia sekolah. *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Industri Pangan UNISRI)*, 1(1). <https://doi.org/10.33061/jitipari.v1i1.1512>
- Wijonarko, B. (2021). Kompetensi Teknis Penyuluh KB Pasca Pelatihan di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Widyaishwara Indonesia*, 2(2), 105-112. <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i2.66>
- Yunus, R. (2019). Evaluasi Pasca Diklat Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2018. *JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE*, 5(1).
- Yusuf, B., & Arif, M. N. R. A. (2015). *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*.